

BANTUAN DARI DBHCHT
2024

PERWAL NO. 8, BD 2024/NO. 8E, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan demi kelancaran proses penyaluran bantuan langsung tunai DBHCHT sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No,or 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT agar berjalan secara efektif, tepat guna dan tepat sasaran.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 215/PMK.07/2021; Pergub No. 1 Tahun 2024; Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2023.
 - Sasaran penerima BLT DBHCHT merupakan buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan dengan kriteria: masih aktif bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Kota Pekalongan dengan status buruh tetap, buruh paruh waktu, dan tenaga Borongan; merupakan warga Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan dan/atau kecamatan; tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemprov Jateng tahun 2024. BLT DBHCHT diberikan kepada buruh pabrik dengan nilai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemberian BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok secara teknis dilaksanakan oleh Dinsos P2KB. Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh tim validasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT mulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran data. Evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh tim validasidata penerima BLT DBHCHT. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, yang difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana, dan pelanggaran lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukap Hasil Tembakau Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.